

Daftar Isi

Gambaran Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 1990 s/d 2006	
Moch. Lutfie Misbach.....	1–7
Peran Civic Diplomacy dalam Mendukung Investasi Kapital dan Strategi Simbolik Indonesia	
June Cahyaningtyas	8–16
Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri	
Citra Hennida	17–23
Kendala Reformasi Dewan Keamanan PBB	
Wulan Purnamawati.....	24–29
Formula Kelembagaan Pemerintah Kota: Studi Evaluasi Implementasi PP No. 41 Tahun 2007	
Alisjahbana.....	30–35
Jawa di Mata Prancis: Analisis terhadap Roman <i>Voyage Autour du Monde Java, Siam & Canton</i> Karya Comte Ludovic de Beauvoir	
Wening Udasmoro	36–41
Variasi Biologis Populasi Manusia di Pulau Jawa: Analisis Kranimetris	
Fitriya Niken Ariningsih	42–48
Peran Faktor Sosial-Ekonomi dan Gizi pada Tumbuh Kembang Anak	
Myrtati D. Artaria.....	49–58
Analisis <i>Framing</i> Berita Poligami di Media Massa	
Moch. Syahri.....	59–66
Hubungan antara Jenis Media yang Digunakan dalam PEMILU 2004 dengan Perilaku Memilih	
Sri Zul Chairiyah.....	67–75
Sistem Pariwisata di Agropolitan Batu	
Sri Endah Nurhidayati	76–85
Diskursus Gender di Pondok Pesantren: Pandangan Santri Laki-Laki dan Perempuan Mengenai Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Kitab Kuning	
Khaerul Umam Noer	86–94

Kendala Reformasi Dewan Keamanan PBB

Wulan Purnamawati¹

Alumnus, Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya

ABSTRACT

There were some problems related to United Nations (UN) Security Council reformation. The UN experienced chronic financial problem so that it was proposed to include other contributors aside from the USA, such as Japan and Germany, as the permanent members of the Security Council. They were expected to overcome the UN financial problem. However, this plan potentially was threatened politically by other nation forces that wanted to prevent this process from happening. Those other nations did not want Japan and Germany to have higher position in the UN. This study found that in case the reform was carried out, the approximation of UN Security Council and the permanent members of UN would not be comparable. It explained that the Article 23 and Article 27 of the Amendment did not offer good position bargain, and that the UN would still be dominated by developed countries.

Key words: reform, United Nations, Security Council, Japan, Germany

Pertama kali didirikan pada 24 Oktober 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah membawahi lima organisasi utama. Pertama, Majelis Umum (MU). Dewan Majelis ini berfungsi sebagai pelaksana sekaligus menyediakan forum untuk membicarakan permasalahan internasional yang dialami oleh masing-masing negara. Begitu pula dengan sidang tahunan PBB yang juga menjadi salah satu bagian tugas dari MU. Kedua, Dewan Keamanan (DK) sebagai sebuah dewan yang memiliki tugas sebagai penjamin serta menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Sesuai dengan pasal 1 piagam PBB, maka Dewan Keamanan ini lebih didominasi oleh negara-negara pemenang Perang Dunia II seperti Uni Soviet (Rusia), Inggris, Perancis, Amerika Serikat, dan Cina. Ketiga, Dewan Ekonomi dan Sosial (DES). Dewan ini lebih fokus dalam tugas penelitian serta melakukan pelaporan atas keadaan yang berhubungan dengan kemanusiaan, pengungsi, sosial-ekonomi, budaya, pendidikan, kondisi buruh, dan lain-lain. Keempat, Dewan Perwalian (DP). Berbeda dengan ketiga Dewan di atas, DP lebih berfungsi sebagai sebuah organisasi yang memiliki tugas untuk melakukan perwalian atas wilayah-wilayah yang sekiranya belum memiliki pemerintahan sendiri dengan mengatasnamakan komunitas internasional. Kelima, Mahkamah Internasional (MI). Organisasi ini memiliki tugas lebih pada penanganan masalah-masalah internasional dengan mendasarkan pada hukum internasional.

Reformasi Baru di PBB 1950–2004

Sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja organisasi, kelima organisasi PBB telah melakukan apa yang disebut dengan proses reformasi. Proses ini sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1950an, dengan lebih menitikberatkan pada upaya memberikan bantuan kepada Sekretaris Jendral (Sekjen) PBB dalam menjalankan tugas-tugasnya. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Sekjen PBB Trygve Lie yang memulai dengan membentuk kelompok tiga ahli serta komite peninjauan gaji pada tahun 1957. Hal serupa juga dilakukan oleh Sekjen PBB Haarmarskjold pada tahun 1960 dengan membentuk kelompok delapan ahli. Dalam perkembangannya, dibentuklah apa yang disebut dengan *joint Inspection Unit (JIU)* 1968 dengan tugas untuk memperbaiki semua fungsi dalam badan PBB. Keberadaan dari JIU ternyata cukup efektif terbukti dari adanya banyak respon usulan dari negara-negara barat untuk menghapus tidak kurang 14 posisi asisten dan wakil Sekjen pada tahun 1980 saat jabatan Sekjen PBB masih dipegang oleh Boutros-Boutros Ghali.

Pada tahun 1989, PBB kembali merestrukturisasi sistem di atas dengan melakukan perbaikan koordinasi pada setiap bidang selain mengorganisir kembali Sekretariat PBB. Upaya ini yang kemudian dilakukan oleh Kofi Annan saat menjabat sebagai Sekjen PBB 1997 dengan mengadakan reformasi struktural pada anggaran serta pengurangan staff.

¹ Korespondensi: W. Purnamawati, Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Unair, Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286. Telp.: 031-5011 744.

Kofi Annan juga lebih memfokuskan perbaikan pada DES, DK maupun melakukan reformasi keuangan PBB. Selain melakukan berbagai perbaikan intern, mulai tahun 2002 Kofi Annan juga banyak menggelar pertemuan untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dunia. Keinginan akan adanya perubahan dalam tubuh PBB tampaknya semakin kian diperlukan, terlihat dari usaha menegaskan kembali usulan reformasi pada HUT PBB 24 Oktober 2004.

Reformasi ditujukan untuk melakukan perubahan dalam tubuh PBB dalam menghadapi ancaman-ancaman baru, seperti ancaman ekonomi dan sosial termasuk kemiskinan, wabah menular, degradasi lingkungan, konflik antar negara, konflik internal, termasuk perang sipil dan genosida, nuklir, radiologikal, senjata kimia dan biologi, terorisme dan kejahatan transnational. Pada saat peringatan tersebut, permasalahan reformasi DK kembali digagas oleh sebagian besar peserta, meski terdapat perbedaan di antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju terutamanya mengenai pemikiran reformasi. Negara-negara maju berpendapat bahwa reformasi dapat diartikan sebagai perubahan struktur, menghentikan program-program yang telah usang dan reorganisasi aparat antar pemerintahan agar lebih efisien dan lebih representatif. Sementara negara berkembang lebih cenderung menginterpretasikan reformasi sebagai sebuah perubahan struktur yang perlu dibenahi kembali, termasuk dengan melakukan perubahan dalam piagam PBB. Negara berkembang menitikberatkan reformasi ini sebagai usaha dalam memperbaiki kinerja DK PBB yang dirasa makin tidak efektif. Ketidakefektifan DK mulai terasa semenjak dimulainya perang antara Irak dengan Amerika Serikat (AS) 2003. Sebagai salah satu anggota DK PBB, Amerika Serikat sering menggunakan hak veto secara tidak bijaksana. Sejarah penggunaan hak veto telah dimulai setahun setelah PBB didirikan terutama oleh lima negara anggota tetap PBB. Dominasi maupun monopoli hak

veto umumnya banyak dipakai oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat serta Rusia (Uni Soviet).

Usul agar diadakan reformasi dalam tubuh DK PBB juga dipicu oleh munculnya banyak perdebatan akibat penyalahgunaan hak veto terutama oleh anggota tetap DK PBB. Ini seperti terlihat dari penggunaan hak veto pada perang Korea oleh Uni Soviet. Kedua, penyalahgunaan hak veto dalam penyelesaian konflik terusan Suez 1956 antara Inggris dan Perancis. Serta ketiga, ketidakpedulian AS pada himbauan PBB untuk menghentikan invasi atas Irak pada tahun 2003.

Dewan Keamanan dan Hak Veto PBB

Ketidakefektifan maupun penyalahgunaan hak veto dalam setiap kinerja DK PBB mengharuskan untuk dilakukan serangkaian proses reformasi dalam Dewan ini. Proses reformasi paling awal dimulai pada tahun 1965 sebagai hasil gagasan dari 18 negara di Amerika Latin serta negara-negara di kawasan Asia dan Afrika pada tahun 1956. Gagasan ini di antaranya berisi tuntutan perluasan keanggotaan tidak tetap dari DK PBB menjadi 10 negara anggota. Gagasan ini mulai terwujud tahun 1965 setelah melalui proses amandemen Pasal 23 dan 27 piagam PBB yang berhasil mendapat ratifikasi sebanyak duapertiga anggota PBB. Pada tahun 1979, negara-negara Asia seperti India, Aljazair, Argentina, Bangladesh, Bhutan, Guyana, Maldiva, Nepal, Nigeria dan Srilangka meminta DK PBB untuk kembali mengubah 10 negara anggota tidak tetap DK PBB menjadi 14 negara anggota. Gagasan ini tidak mendapat tanggapan dari DK-PBB.

Pada tahun 1992, negara-negara yang tergabung dalam Gerakan Non-Blok kembali menggagas proposal untuk membicarakan kinerja PBB, khususnya DK. Pada saat itu negara-negara ini membuat proposal yang berisi masukan reformasi DK PBB. Proposal ini kemudian menjadi dasar

Tabel 1.
Penggunaan Hak Veto Anggota Tetap DK PBB Berdasarkan Konflik Internasional

Tahun	Negara Pengguna Hak Veto yang Mendominasi	Konflik
1946-1966	Uni Soviet, Inggris, Perancis	Kebanyakan pada periode ini konfliknya berkaitan dengan masalah pelamar keanggotaan PBB, konflik agresi ke Republik Korea, Terusan Suez, India-Pakistan, Timur Tengah.
1966-1986	Uni Soviet, AS	Konflik Timur Tengah, Konflik Benua Afrika (Zimbabwe), Konflik Vietnam
1986-2004	AS, Inggris	Konflik Timur Tengah (Israel-Palestina), Perang Irak

Sumber: Diolah berdasarkan data dari United Nations dan Sydney D. Bailey beserta Sam Daws, "Subject of The UN Security Council Vetoes", *The Procedure of The UN Security Council*, Third Edition (Oxford: Clarendon Press, 1998).

terbentuknya Resolusi 47/62 yang menginstruksikan Sekjen untuk mengundang negara-negara anggota PBB untuk berpartisipasi menyerahkan essay mengenai komentar negara tentang reformasi DK PBB. Sebagai hasilnya, mayoritas menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan komposisi dan metode kerja DK PBB pada saat itu. Usaha ini dilanjutkan kembali di tahun 1993 yakni dengan membentuk lima kelompok kerja terbuka atau *Open Ended Working Group* salah satunya adalah kelompok kerja terbuka yang membahas masalah reformasi DK PBB. Pertemuan-pertemuan yang digelar oleh kelompok kerja ini terjadi sampai tahun 2002.

Dibawah pimpinan Razali Ismail 1997, kelompok kerja ini menghasilkan proposal yang bernama Razali Plan. Dalam proposal diusulkan agar reformasi DK PBB lebih terfokus pada perluasan keanggotaan tetap dari negara baru, yakni masing-masing diusulkan dari dua negara industri serta tiga negara dari dunia ketiga yang mewakili kawasan Afrika, Asia, serta Amerika latin termasuk Karibia. Razali Plan juga mengusulkan untuk meningkatkan keefektifan pengambilan keputusan anggota DK PBB dengan cara selalu melakukan konsultasi diantara anggota-anggota DK PBB dengan negara penerima keputusan. Dalam Razali Plan diusulkan pula adanya kerjasama antara DK PBB dengan organ-organ penting lainnya untuk meningkatkan transparansi. Tahun 2002, dikeluarkan 2 bahasan (*cluster*) seputar reformasi DK PBB antara lain berkaitan dengan pengambilan keputusan DK (termasuk didalamnya penggunaan

hak veto) yakni, perluasan keanggotaan DK PBB, dan metode kerja DK juga transparansi kinerjanya.

Tahun 2004 menjadi tahun dimana reformasi PBB disuarakan kembali termasuk mengenai DK PBB. Sekjen PBB Kofi Annan sendiri memprakarsai adanya suatu panel tingkat tinggi yang diberi nama *High Level Panel On Threats, Challenge and Change*. Panel ini diantaranya menghasilkan dua buah model proposal mengenai perluasan anggota DK PBB sebagaimana dalam tabel di bawah

Model A menyediakan enam kursi anggota tetap, tanpa hak veto, sedangkan untuk kursi anggota tidak tetap disediakan tiga kursi dengan jangka waktu 2 tahun. Untuk model dua dapat terlihat dalam tabel 3 di bawah

Dalam Model B, panel sengaja meniadakan keberadaan permintaan kursi anggota tetap. Meski demikian panel juga menciptakan kategori baru yang terdiri dari delapan kursi anggota yang setiap 4 tahun dapat diperbarui dan satu kursi anggota tidak tetap yang tidak dapat diperbarui selama jangka waktu 2 tahun. Proposal ini cukup efektif mengingat dari keluwesan yang selalu dapat diterapkan pada empat wilayah dunia (Afrika, Asia-Pasifik, Eropa dan Amerika).

Terdapat beberapa kelompok yang berpartisipasi secara rutin terlibat dalam proses reformasi tahun 2004, antara lain *Group Of Four (G4)*, *Uniting For Consensus*, dan *African Union*. Masing-masing kelompok negara bangsa ini mempunyai tujuan masing-masing. G4 yang terdiri atas Jerman,

Tabel 2.
Proposal Reformasi DK PBB Model A

Regional	Jumlah Negara	Kursi Anggota Tetap	Kursi Anggota Tetap Yang Diminta	Kursi Anggota Tidak Tetap Yang Diminta 2 tahun (Tidak diperbarui)	Total
Afrika	53	0	2	4	6
Asia-Pasifik	56	1	2	3	6
Eropa	47	3	1	2	6
Amerika	35	1	1	4	6
Total	191	5	6	13	24

Sumber: Report of The Secretary General's High Level Panel on Treaths, Challenges and Change, *A More Secure World: Our Shared Responsibility* (United Nations, 2004).

Tabel 3.
Proposal Reformasi DK PBB Model B

Regional	Jumlah Negara	Kursi Anggota Tetap	Kursi Anggota Jangka Waktu 4 tahun (Dapat Diperbarui)	Kursi Anggota Tidak Tetap Yang Diminta 2 tahun (Tidak diperbarui)	Total
Afrika	53	0	2	4	6
Asia-Pasifik	56	1	2	3	6
Eropa	47	3	2	1	6
Amerika	35	1	2	3	6
Total	191	5	8	11	24

Sumber: Report Of The Secretary General's High Level Panel on Treaths, Challenges and Change, *A More Secure World: Our Shared Responsibility* (United Nations, 2004).

Jepang, India dan Brazil pada mulanya menuntut perluasan anggota tetap dengan menyertakan perluasan hak veto sebagai salah satu syarat. Meski dalam kenyataannya kemudian banyak tuntutan dari kelompok negara ini yang dikurangi mengingat tidak semudah memberikan hak veto kepada setiap negara. Di lain pihak, *Uniting For Consensus* yang diprakarsai oleh negara-negara yang terlibat konflik dengan negara anggota G4 seperti Pakistan dan Italia menyatakan akan menjadi pihak oposisi bagi setiap usaha yang dilakukan G4 termasuk dukungan mereka terhadap perluasan anggota tetap dengan tidak menyertakan hak veto. Sementara *African Union* menjadi kelompok baru yang lahir atas dukungan negara-negara yang terlibat dalam G4 dan *Uniting For Consensus* mengajukan tuntutan yang berbeda. Mereka menuntut perluasan hak veto bagi anggota tetap baru.

Dewan Keamanan: Reformasi & Moneter

Masalah lain yang terjadi pada PBB bukan hanya menyangkut masalah reformasi dalam DK PBB, namun juga masalah keuangan yang dikaitkan dengan isu reformasi DK. Awal mula masalah keuangan terjadi saat terjadi krisis Kongo 1960-an. Walaupun telah dilakukan beberapa cara termasuk dengan mengurangi program-program serta melakukan pengetatan anggaran, masalah keuangan PBB makin berkembang seiring dengan banyaknya negara-negara maju seperti AS dan Rusia yang menunggak untuk melakukan pembayaran sebagaimana yang telah disepakati selama ini. Begitu pula dengan adanya gagasan mengenai ketentuan pengurangan pembayaran minimum dari 0,02% (1973) menjadi 0,01% (1978) cenderung tidak membuahkan hasil, bahkan hutang-hutang PBB masih saja terlihat menumpuk.

Salah satu usul dalam laporan panel tingkat tinggi tahun 2004 yang berjudul *A More Secure World: Our Shared Responsibility* menyebutkan bahwa perluasan anggota PBB hendaknya memasukkan negara-negara yang secara finansial, militer dan diplomatik mampu untuk memberikan kontribusi besar bagi PBB. Banyak negara yang memiliki potensi baik secara finansial serta militer menjadi anggota tetap PBB seperti Jepang dan Jerman. Ironisnya, berbagai usaha yang dilakukan oleh Jerman dan Jepang mendapat tentangan dari Italia dan Pakistan, bahkan salah satu anggota tetap DK PBB, yaitu Cina, menolak keterlibatan Jepang di masa depan dalam keanggotaan tetap DK PBB mengingat Cina merasa masih mempunyai masalah pribadi yang belum

terselesaikan dengan Jepang. Sementara itu African Union mengusulkan Nigeria, Afrika Selatan dan Mesir sebagai kandidat utamanya untuk menduduki kursi anggota tetap DK PBB. Keinginan *African Union* ini tertuang dalam sebuah proposal, pada intinya menginginkan penambahan enam anggota baru sebagai anggota tetap, termasuk dua kursi untuk negara Afrika.

Kenyataan di atas menarik bila dihubungkan dengan menggunakan kerangka pemikiran mengenai kepentingan nasional dari Thomas W. Robinson. Menurut Thomas Robinson pencapaian kepentingan nasional dapat dilakukan dengan menggunakan kekuatan baik perang maupun menggunakan kekuatan militer lainnya. Model kedua adalah dengan cara aliansi yakni, suatu negara membentuk kerjasama dengan negara lain atas dasar persamaan kepentingan dan saling menguntungkan. Sementara dalam melakukan interaksinya dengan negara lain, kelompok-kelompok ini cenderung berkonflik satu sama lain (*conflicting interest*), kepentingannya berlainan satu sama lain, cenderung saling menjegal antara satu dengan yang lain.

Kerangka pemikiran lain digunakan dalam penelitian ini adalah organisasi internasional, konsep *great power* dan konsep hak veto. Organisasi internasional digunakan untuk menjelaskan DK PBB sebagai organ utama PBB yang diberi tugas untuk menjamin keamanan dan perdamaian internasional. Sedangkan *great power* digunakan untuk melihat keterlibatan anggota tetap DK dalam proses reformasi. Konsep hak veto digunakan untuk menjelaskan tujuan dari berbagai usaha yang dilakukan oleh negara-negara pereformasi yang sebagian besar berkeinginan menjadi anggota tetap.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa selama ini yang menjadi kendala reformasi DK PBB khususnya tahun 2004 antara lain, secara ekonomi PBB mengalami masalah keuangan yang menahun yang kemudian memunculkan usulan untuk dimasukkannya kontributor terbesar kedua setelah AS, yaitu Jerman dan Jepang dalam anggota tetap DK dengan kompensasi dapat mengatasi masalah keuangan yang dialami PBB. Namun secara politik potensi Jerman dan Jepang terhadang oleh kekuatan-kekuatan negara lain yang ingin menggagalkan proses tersebut, sehingga tidak dapat menaikkan posisi kedua negara maju tersebut. Dalam penelitian ini pula penulis menemukan bahwa seandainya bila reformasi sampai dilakukan, perbandingan antara

negara-negara anggota DK dengan keseluruhan anggota tetap PBB tidak akan sebanding, yang menjelaskan sebenarnya amandemen Pasal 23 dan Pasal 27 tidak mengakibatkan posisi tawar menawar yang berimbang, yang berarti pula masih saja didominasi oleh negara-negara maju. Bila pada tahun 1965 jumlah anggota PBB melonjak menjadi sekitar 114, dan anggota DK sebanyak 15 anggota maka perbandingannya menjadi 7,6 banding 1. Berarti 1 negara anggota DK melayani sekitar 7 negara anggota PBB. Pada tahun 2004 bila dilakukan penambahan anggota DK menjadi 25 sementara anggota PBB mencapai 191 anggota, maka perbandingannya menjadi sama yaitu 1 banding 7,6. Bila dibandingkan dengan tahun 1965 hasilnya pun akan sama. Dengan kata lain reformasi, bila dilakukan, tidak banyak memberikan perubahan yang berarti bagi negara-negara yang terlibat di dalamnya, kecuali menambah kekuasaan negara-negara maju.

Daftar Pustaka

- Afoaku, Osita G. dan Ukaga, Okechuwu (2001) United Nations Security Council Reform: A Critical Analysis of The Enlargement Options. *Journal of Third World Studies*. Fall.
- Archer, Clive (1983) *International Organizations*. London: George Allen and UNWIN.
- Ariyuruk, Ayca (2005) Players and Proposals In The Security Council Debate 2005, www.centerforunreform.org, diakses 25 Oktober 2005.
- Background & History of The UN Financial Crisis (2005) www.globalpolicy.org/finance/chronol/hist.htm, diakses 19 Oktober 2005.
- Bailey, Sidney D. dan Daws, Sam (1998) *The Procedure of The UN Security Council*, Third Edition. Oxford: Clarendon Press.
- Barros, James PBB (1990) *Dulu, Kini dan Esok*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Basic Facts* (2000) *About The United Nations*. New York: United Nations Departement Of Public Information, 2000.
- Bennet, A. Leroy (1980) *International Organizations: Principles and Issues*. Second Edition New Jersey: Prentice Hall.
- Between Politics And Efficiency: United Nations Reform And Conflict Of Interest (2005) www.mtholyoke.edu/acad/intrel/schles.htm, diakses 15 Maret 2005.
- Bourantonis, Dimitris (2005) Reform of The UN Security Council and The Non-Aligned States. *International Peacekeeping*, Vol. 5, Issue 1.
- Bull, Hedle (1977) *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics*. New York: Columbia University Press.
- Coulombis, A. dan Wolfe, James H. (1999) *Pengantar Hubungan Internasional; Keadilan dan Power*, alih bahasa Mercedes Marbun. Edisi ketiga. Bandung: Penerbit Putra A. Bardin.
- Deutsche Welle (2004) Deutsche Bid for Permanent Security Council Seat. 22 September 2004, www.globalpolicy.org/security/refrom/cluster1/2004/0922permbids.htm, diakses 16 Desember 2004.
- Deutsche Welle (2004) G4 Nations Bid for Permanent Security Council Seat. 22 September 2004, www.globalpolicy.org/security/reform/cluster1/2004/0922permbids.htm, diakses 16 Desember 2004.
- Dewan Keamanan PBB: Perubahan Jumlah Anggota Terganjil Kepentingan Sempit.(2005) *Kompas*. 23 September 2005.
- Djelantik, Sukawarsini (2004) Mengapa PBB Harus Direformasi. *Pikiran Rakyat*. 24 Oktober 2004.
- Djiwandono, Soedjati (2004) Restrukturisasi Dewan Keamanan PBB? www.unisosdem.org/ekopol_detail.php, diakses 17 Desember 2004.
- Duke, Simon (1992) The UN Finance Crisis: A History And Analysis. *International Relations*. Vol.XI, No. 2. The David Davies Memorial Institute Of International Studies: August.
- Eban, Abba (1995) The UN Idea Revisited. *Foreign Affairs*. Vol.74, No. 5. September/October.
- Evans, Graham dan Newnham, Jeffrey (1998) *The Penguin Dictionary of International Relations*. London: Penguin Books.
- Fassbender, Bardo (1998) *UN Security Council Reform and The Right of Veto: A Constitutional Perspective*. The Hague: Kluwer Law International.
- Fawcett, Eric dan Newcombe, Hanna (1995) *United Nations Reform: Looking Ahead After Fifty Years*. Toronto: University of Toronto.
- Gardiner, Nile Phd dan Schaefer, Brett D. (2005) UN Security Council Expansion Is Not In The UN Interest. *Backgrounder*. No. 1876. Massachusetts: Heritage Foundation.
- Glennon, Michael J. (2003) Why The Security Council Failed. *Foreign Affairs*. May/June
- Goulding, Marrack (1999) Globalization And The United Nations: New Opportunities, New Demand, *International Relations*. Vol.XIV, No. 4. The David Davies Memorial Institute of International Studies.
- Hall, Gregory O. (2002) The United Nations Security Council In The New World Order: Reforming To Meet The New Security And Development Challenges Of The Post-Cold War World. *India Quarterly*. Vol LVIII, No. 3&4.
- History of UNSC Reform (2005) www.auswaertigesamt.de/www/en/aussenpolitik/vn/vereinte_nationen/reform/dt-reform_html, diakses 29 Mei 2005.
- Hosen, Nadirsyah (2004) Antara United Nations dan United States. www.media.isnet.org/isnet/nadirsyah/unusa.html, diakses 30 Desember 2004.

- Jones, Walter S. (1991) *The Logic Of International Relations*. Seventh Edition. New York: Harper Collins.
- Knight, Andrew (2002) *Enhancing Global Governance*. New York: Nations University Press.
- Koetz, Axel G. dan Otte, Max (1992) *Crisis and Reform of The UN Development System*. *Aussen Politik*. Vol. 43, No. 2. Hamburg: Interpress Verlag GmbH.
- Korean War Chronology (2005) www.koreanwar.org, diakses 23 Oktober 2005.
- Lowenthal, Mark M. (2003) *Intelligence from Secrets to Policy*. Second Edition. CQ Press, Washington D.C.
- Luck, Edward C. (2003) *Reforming The United Nations: Lessons From History In Progress*. *International Studies and The United Nations Occasional Papers*. No. 1. Columbia University.
- Mas'ood, Mohtar (1990) *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- McMahon, Robert (2004) *Echoes of Reform Sound at The General Assembly Debate*. Radio Free Europe. www.globalpolicy.org/security/reform/cluster1/2004/1001echoes.htm, diakses 16 Desember 2004.
- Mikhailtchenko, Maria (2001) *Reform Of The Security Council And Its Implications For Global Peace And Security*, *Journal Of Military And Strategic Studies*, Vol.7, Issue 1.
- Nasution, Dahlan (1988) *Perang Atau Damai Dalam Wawasan Politik Internasional*. Bandung: Remadja Karya.
- Negara Asia-Afrika Dukung Reformasi PBB (2005) *Media Indonesia*. 01 April 2005.
- Nolan, Cathal J. (2002) *The Greenwood Encyclopedia of International Relations*. Westport, London.
- Papadopolou, Maria (2005) *The Security Council Reform*. UK: University of Essex.
- Paul, James A. (2005) *Security Council Reform: Arguments About The Future Of The United Nations System*, www.globalpolicy.org/security/pubs/secref.htm, diakses 18 Juni 2005.
- Reform of the United Nations Security Council (2005) www.auswaertiges-amt.de/www/en/aussenpolitik/vn/vereinte_nationen/reform/dt-reform_html, diakses 29 Mei 2005.
- Report of Open Ended Working Group On The Question of Equitable Representation On And Increase Of The Security Council And Other Matters Related To That Body (2003) 58th Session, UN Doc A/58/47. New York: United Nations.
- Report Of The Open-Ended Working Group on the Question of Equitable Representation On and Increase in the Membership of the Security Council and Other Matters Related to the Security Council (2003) 57th Session, Introduction, A/57/47. New York: United Nations.
- Report Of The Secretary General (1992) *An Agenda For Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking, And Peacekeeping*, A/47/277-S/24111, 17 Juni 1992.
- Report Of The Secretary General's High Level Panel on Treaties (2004) *Challenges and Change, A More Secure World: Our Shared Responsibility*. New York: United Nations Department of Public Information.
- Rosenau, James N. (1969) *International Politics and Foreign Policy: A Reader On Research and Theory*. New York: The Free Press.
- Rourke, John T. (1997) *International Politics On The World Stage*. Sixth Edition. Connecticut: Dushkin, McGraw-Hill.
- Sarihartono, Soepardi (1993) *Organisasi dan Administrasi Internasional*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Security Council Resolutions on Palestine Vetoed by the U.S. (2004) www.jewishvirtuallibrary.org/jsources/UN/usveto.html, diakses tanggal 12 Desember 2004.
- Singarimbun (1989) Masri dan Effendi, Sofian. (*Metode Penelitian Survey*. Eds. Jakarta: LP3ES.
- Spanier, John (1990) *Games Nations Play*. Seventh Edition. Florida: Congressional Quarterly Press.
- Steele, David B. (2000) *UN Charter Reform and New Global Bargain*. *International Relations*. Vol. XV, No. 3. The David Davies Memorial Institute of International Studies.
- Thakur, Ramesh (2004) *The United Nations Security Council Reform*. Pretoria: Institute for Security Studies.
- The Secretary General Report (2002) *Strengthening of The United Nations: An Agenda for Further Change*, UN Doc A/57/387. 9 September 2002.
- UN Reform Dossier 1997-2004 (2005) www.un.org/reform/dossier.html, diakses 18 Juni 2005.
- Weiss, Thomas G. (2003) *The Illusion of UN Security Council Reform*, *The Washington Quarterly*. Autumn.
- Weiss, Thomas G. (2005) *Overcoming The Security Council Reform Impasse: The Plausible Versus The Plausible*. *Dialogue On Globalization*. No. 14. New York: Friedrich Ebert Stiftung.
- Wicaksana, I Gede Wahyu (2005) *Reformasi PBB*. *Surabaya Post*. 12 Maret 2005.
- Wilenski, Peter (1994) *United Nations-Divided World*. New York: Oxford University Press.
- Wilkinson, James M. dan Sullivan, Christopher D. (2004) *The UN Security Council and Iraq*. www.unc.edu/depts/diplomat/archives_rol/2004_01-03/wilkinsull_unsec/wilkinsull_p2.html, diakses 17 Desember 2004.
- Wirengjurit, Dian (1995) *Dibalik Masalah Perluasan Keanggotaan DK PBB*. *Kompas*. 17 Februari 1995.